

**IMPLEMENTASI E-KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN
JASA TERHADAP UMKM DI KOTA BATU**

(Studi Pada Kantor CV. Bias Cipta Estetika di Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MOHAMMAD DAVA NUGROHO

NPM 22001091053



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2025**

RINGKASAN

Mohammad Dava Nugroho, 2025, Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap UMKM Di Kota Batu (Studi Pada Kantor CV. Bias Cipta Estetika di Kota Batu). Dosen Pembimbing I Dr. Khoiron, S.AP., M.IP, Dosen Pembimbing II Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pemberdayaan UMKM. Melalui e-procurement yang diatur dalam Perpres No. 54/2010 dan No. 16/2018, pemerintah mendorong keterlibatan UMKM, termasuk di Kota Batu yang memiliki 14.000 UMKM. Meski alokasi anggaran pengadaan bagi UMKM mencapai Rp279,2 miliar pada 2023, banyak pelaku usaha belum memahami e-katalog. Pemkot Batu berupaya meningkatkan pemanfaatannya melalui sosialisasi, pendampingan, dan inovasi produk agar lebih kompetitif. Implementasi e-katalog yang optimal diharapkan mendukung UMKM serta menjamin kualitas dan harga barang.

Untuk mendukung penelitian ini, digunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilla S.Grindle yang terdiri dari *content of policy (interest affected, type of benefits, extent of change envisioned, site of decision making, program implementer, resources committed)* dan *context of implementation (power, interest, and strategy of actors involved, institution and regime characteristics, compliance and responsiveness)*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM di Kota Batu, dengan lokasi penelitian di CV. Bias Cipta Estetika. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berupa pelaku UMKM dan pegawai CV. Bias Cipta Estetika, serta data sekunder dari dokumen terkait. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi, analisis negatif, dan membercheck untuk memastikan validitas hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-katalog di Kota Batu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses pasar bagi UMKM, meski masih menghadapi tantangan adaptasi teknologi dan regulasi. Kebijakan ini mempermudah akses pasar, memastikan pembayaran, dan meningkatkan transparansi, namun butuh pendampingan intensif. Keberhasilannya bergantung pada interaksi pemerintah, LKPP, penyedia jasa, dan UMKM, serta dukungan institusional. Tantangan utama meliputi infrastruktur, literasi digital UMKM, dan kompleksitas administrasi. Optimalisasi e-katalog memerlukan strategi pendampingan komprehensif dan penyederhanaan prosedur agar lebih efektif.

Kata Kunci: E-Katalog, Pengadaaan Barang dan Jasa, Implementasi Kebijakan



SUMMARY

Mohammad Dava Nugroho, 2025, Implementation of E-Catalog in Procurement of Goods and Services for MSMEs in Batu City (Study at CV. Bias Cipta Estetika Office in Batu City). Supervisor I Dr. Khoiron, S.AP., M.IP, Supervisor II Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

Government procurement of goods and services in Indonesia aims to increase efficiency, transparency, and empowerment of MSMEs. Through e-procurement regulated in Presidential Regulation No. 54/2010 and No. 16/2018, the government encourages the involvement of MSMEs, including in Batu City which has 14,000 MSMEs. Although the procurement budget allocation for MSMEs reaches IDR 279.2 billion in 2023, many business actors do not yet understand the e-catalog. The Batu City Government is trying to increase its utilization through socialization, assistance, and product innovation to be more competitive. Optimal implementation of the e-catalog is expected to support MSMEs and guarantee the quality and price of goods.

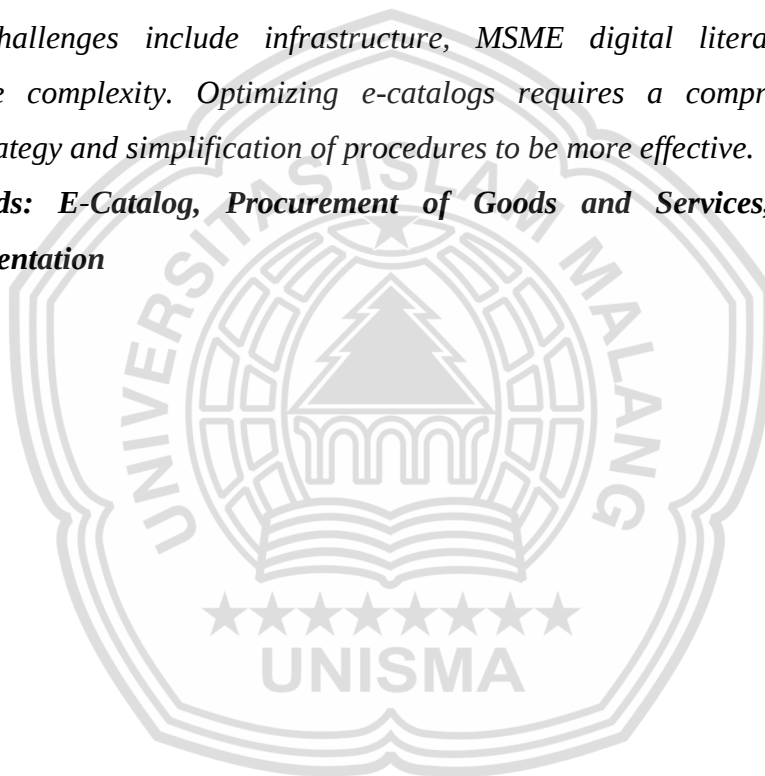
To support this research, the theory of policy implementation by Merilla S. Grindle is used, which consists of the content of policy (interest affected, type of benefits, extent of change envisioned, site of decision making, program implementer, resources committed) and context of implementation (power, interest, and strategy of actors involved, institution and regime characteristics, compliance and responsiveness).

This study uses a descriptive qualitative approach to understand the implementation of E-Catalog in the procurement of goods and services for MSMEs in Batu City, with the research location at CV. Bias Cipta Estetika. Data were obtained from interviews, observations, and documentation, with primary data sources in the form of MSME actors and employees of CV. Bias Cipta Estetika, as well as secondary data from related documents. Data analysis follows the Miles and Huberman model, including collection, condensation, presentation, and drawing conclusions. The validity of the data is guaranteed through extended

observation, persistence, triangulation, negative analysis, and member checking to ensure the validity of the research results.

The results of the study show that the implementation of e-catalog in Batu City increases transparency, efficiency, and market access for MSMEs, although it still faces challenges in adapting technology and regulations. This policy facilitates market access, ensures payments, and increases transparency, but requires intensive assistance. Its success depends on the interaction between the government, LKPP, service providers, and MSMEs, as well as institutional support. The main challenges include infrastructure, MSME digital literacy, and administrative complexity. Optimizing e-catalogs requires a comprehensive assistance strategy and simplification of procedures to be more effective.

Keywords: *E-Catalog, Procurement of Goods and Services, Policy Implementation*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah masuk dalam klasifikasi negara berkembang, yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan pesat, baik secara material maupun nonmaterial. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia, maka semakin dibutuhkan tata kelola pemerintahan. Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi dengan pengadaan barang atau jasa. Kebutuhan akan barang dan jasa merupakan aspek utama tata kelola pemerintahan (Suryono, 2022: 66). Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, dan Instansi Pemerintah. Dalam proses pengadaan barang/jasa, terdapat berbagai prinsip dasar yang menjadi tolok ukur pelaksanaannya. Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, imparial atau tidak diskriminatif, dan bertanggung jawab. Prosedur terdokumentasi diawali dengan identifikasi kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Pengadaan Umum (RUP) dan berlanjut hingga seluruh kegiatan terkait pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan dengan dana APBN/APBD (Mawarni, 2020: 81).

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan yang krusial dalam rangka mencapai pembangunan. Dilihat dari berbagai sudut pandang, kemajuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari usaha ini. Di sektor ekonomi, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dicapai

melalui proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Di sektor sosial, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan juga membantu dalam mengatasi masalah sosial tertentu. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kemajuan otonomi daerah, telah terjadi tuntutan yang lebih besar terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif oleh pemerintah. Persyaratan pemerintah dapat bersifat nyata atau tidak nyata. Persyaratan ini dinyatakan melalui proses pembelian produk/jasa.

Untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan informasi, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang cepat, tepat, transparan, dan efisien, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut telah menetapkan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yang dikenal dengan e-procurement. Peralihan dari metode lelang manual atau non e-tendering ke e-procurement pada tahun 2010 telah berdampak signifikan terhadap peningkatan proses pengadaan barang dan jasa. Terjadi peningkatan efektivitas penghematan keuangan negara dan transparansi proses pengadaan barang/jasa dibandingkan sebelumnya (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mencakup seluruh aspek mulai dari perencanaan dan penganggaran, persiapan lelang, penetapan harga perkiraan,

pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan penyerahan hasil pekerjaan. Efektivitas dan efisiensi proses pengadaan sangat bergantung pada metode yang digunakan dalam memilih pemasok. Pemilihan pemasok yang tepat akan menghasilkan produk/jasa yang memenuhi persyaratan dan diserahkan pada waktu yang tepat. Pengadaan barang/jasa yang sudah terstandar dan tersedia dalam jumlah yang cukup di pasaran dapat dilakukan secara elektronik, yang disebut juga dengan *e-purchasing*. Aplikasi *e-purchasing* menggunakan e-katalog, yaitu sistem elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai mengatur lebih rinci penerapan e-katalog dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setelah Peraturan Presiden tersebut diimplementasikan, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dapat dilakukan melalui e-katalog. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, katalog elektronik atau E-Katalog merupakan sistem informasi digital yang memuat daftar, kategori, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (5) menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib dilaksanakan untuk barang/jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nasional atau kebutuhan strategis yang ditetapkan oleh menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah. Dengan demikian, untuk barang/jasa yang tidak memenuhi kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau kebutuhan strategis, pengadaan barang/jasa tidak wajib dilaksanakan melalui metode pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8, untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya.

Berdasarkan catatan, Kota Batu memiliki lebih dari 14.000 UMKM yang semuanya harus diikutsertakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memajukan UMKM dan memajukan barang dalam negeri. Pemerintah Kota Batu telah mengembangkan inovasi E-Katalog yang disebut Pengadaan Barang dan Jasa Belanja melalui Katalog Elektronik Lokal. Sementara itu, menurut Dian Fachroni, Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batu, saat ini masih banyak

pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Kota Batu yang belum memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal, Pemerintah Kota Batu dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp279,2 miliar untuk pengadaan barang dan jasa bagi UMKM pada tahun 2023.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, meminta Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk mengurangi belanja langsung dan menggunakan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan harga barang yang lebih terjamin serta mendukung UMKM lokal. Aries juga mengusulkan pemasaran produk UMKM di hotel dan restoran untuk meningkatkan visibilitas dan kebanggaan produk lokal melalui program E-Katalog, yang membantu UMKM masuk ke e-katalog serta Pj Wali Kota Batu menghimbau untuk memanfaatkan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa. Belanja melalui e-katalog memastikan kualitas dan harga barang terjamin, serta mendukung UMKM lokal. Aries mendorong pemasaran produk UMKM di hotel dan restoran untuk meningkatkan visibilitas dan kebanggaan produk lokal.

Serta Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyoroti kondisi produk UMKM di Kota Batu yang meskipun harganya murah, namun kurang diminati karena kualitas dan bentuknya yang kurang menarik. Aries menekankan pentingnya inovasi dan peningkatan kualitas produk untuk menarik minat konsumen. Ia juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Selain itu, Aries mengusulkan pengembangan sentra UMKM sebagai pusat edukasi dan pemasaran produk serta

mengajak pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam memanfaatkan pemasaran digital melalui program E-Katalog (malang-post.com).

Berdasarkan data pertama kutipan berita dari Peraturan BPK Kota Batu, terdapat lebih dari 14.000 UMKM di Kota Batu. Semua itu wajib diikutsertakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai wujud komitmen memajukan UMKM dan mencintai produk dalam negeri, namun masih banyak UMKM di Kota Batu yang belum mengenal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal, potensi dana yang dialokasikan untuk UMKM pada tahun 2023 sebesar Rp279,2 miliar. Hal ini sangat disayangkan dari sini peneliti bisa mengambil Tindakan bahwa kurangnya implementasi e-katalog ke masyarakat umum lebih khususnya di Kota Batu.

Sedangkan dari kutipan berita dari sumber tugumalang juga berkesinambungan bahwasanya masih banyak OPD berbelanja langsung dan disarankan untuk menggunakan e-katalog untuk dalam pengadaan barang dan jasa, hal ini bertujuan memastikan kualitas dan harga barang yang lebih terjamin serta mendukung UMKM lokal. Bisa disimpulkan bahwasanya hingga saat ini masih banyak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kota Batu yang belum mengenal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Padahal potensi Belanja Pengadaan Pemerintah Kota Batu sangatlah tinggi. Dengan adanya permasalahan tersebut Pemerintah Kota Batu mulai berbenah dengan membuat program baru dan memulai sosialisasi. Diharapkan banyak masyarakat yang mengetahui dan mulai menggunakan e-katalog. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan harga barang yang lebih terjamin serta mendukung UMKM lokal. Oleh karena itu, perlu

dilakukan Implementasi Kebijakan E-Katalog terhadap Barang dan Jasa UMKM di Kota Batu secara menyeluruh untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut agar dapat terwujud.

B. Penelitian Terdahulu

Menemukan persamaan dan memperoleh ide-ide segar untuk penelitian di masa mendatang merupakan tujuan dari penelitian sebelumnya. Lebih jauh lagi, penelitian sebelumnya membantu peneliti dalam menetapkan penelitian mereka dan menunjukkan keunikannya (Halawa et al, s2022: 1528). Berikut ini adalah beberapa jurnal terkait yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang digunakan peneliti ketika melakukan penelitian guna menyempurnakan teori yang digunakan dalam penelitiannya (Randi, 2018: 15). Meskipun peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul penelitiannya, namun peneliti mengambil beberapa penelitian sebagai referensi guna menyempurnakan bahan kajian dalam penelitian ini.

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan, penelitian terdahulu digunakan dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung, dan tambahan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama. Hal ini memudahkan dalam melakukan perbandingan dan melengkapi penelitian lain yang mengangkat tema yang sama. Beberapa akademisi telah melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah sejauh ini, tetapi hanya sedikit yang membahas tentang implementasi kebijakan E-Katalog. Fenomena ini sangat jarang terjadi dan tergantung pada kebutuhan masing-masing lokasi. Dalam penulisan dan analisis sebuah penelitian, peneliti mengacu pada

penelitian terdahulu sebagai acuan. Penelitian terdahulu ini merupakan hasil penelusuran peneliti terhadap berbagai publikasi penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan pokok bahasan yang diteliti. Adapun tema yang diangkat oleh peneliti yaitu, Implementasi Kebijakan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap UMKM di Kota Batu.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2020, dengan penelitian berjudul Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM. Untuk mengkaji secara mendalam doktrin dan asas yang berkaitan dengan pokok permasalahan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan teori Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis bukti-bukti sekunder (buku-buku) yang berkaitan dengan topik penelitian. Karena e-katalog dapat mengurangi waktu dan prosedur yang diperlukan untuk pengadaan, penelitian ini mengarah pada penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pengadaan yang lebih terbuka, transparan, dan efisien.

Penelitian Kedua, yang dilakukan oleh Fitri Diani dan Fauzi Arif Lubis pada tahun 2022. Yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah” . Penelitian ini menerapkan teori peran Robert K. Merton dan metodologi kualitatif untuk mengkaji data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah Dengan penekanan pada dukungan ekonomi syariah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan e-katalog telah mempengaruhi pertumbuhan

UMKM di Kota Medan. Para ulama memegang peranan penting dalam memajukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan bisnis dan memperkuat ekonomi lokal.

Penelitian Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Prikustiawan pada tahun 2023, dengan penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui E-Katalog Lokal untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Penelitian deskriptif dapat dipahami sebagai suatu proses penyelesaian masalah dengan cara mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian, yang dapat mencakup individu, organisasi, atau masyarakat, dan menganalisis suatu masalah berdasarkan informasi terkini atau sesuai dengan kenyataan (Sugiyono, 2017). Teori Gibson (2005) yang menggabungkan beberapa dimensi untuk menganalisis kebijakan pengadaan dengan E-Catalog, meliputi teknik analisis data penelitian melalui analisis interaktif. Dimensi-dimensi tersebut meliputi dimensi produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan. Lima pengusaha UMKM Kota Surabaya menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan E-Katalog daerah telah memenuhi faktor implementasi kebijakan publik dalam prosedur pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya untuk UMKM secara keseluruhan.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa mengenai elektronik katalog (E-Katalog) sangat penting diimplementasikan ataupun digunakan dengan baik dan benar, E-Katalog ini akan berjalan optimal apabila pemerintah bisa saling menyongkong serta memberikan edukasi serta sosialisasi

secara menyeluruh kepada masyarakat terutama para UMKM lokal, selain itu peran masyarakat ataupun UMKM juga sangat diperlukan dalam peran penggunaan E-Katalog sehingga dengan adanya peran masyarakat yang bisa saling bekerja sama dengan pemerintah yang mumpuni agar supaya bisa mencapai tujuan yang sama. Dari penelitian tersebut, masih mengungkapkan bahwa minimnya partisipasi masyarakat bahkan ada beberapa penyedia jasa yang masih belum mengetahui apa itu sistem E-Katalog. Selanjutnya dari ketiga penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan yaitu mengenai penggunaan sistem E-Katalog, sistematika, cara penggunaannya. Berdasarkan beberapa review penelitian terdahulu di atas, penelitian ini berlokasi di Kantor CV. Bias Cipta Estetika di Kota Batu dan menggunakan teori implementasi menurut Grindle (2017). Teori ini berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan yang melibatkan dua dimensi utama, yaitu **isi** kebijakan dan konteks pelaksanaannya, sehingga dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan teori hukum normative, teori peran oleh Robert K. Merton, serta teori Gibson (2005) dengan lima dimensi (produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan) untuk menganalisis kebijakan e-katalog. Berdasarkan hasil dari beberapa survei penelitian dari beberapa penulis dengan topik pembahasan Implementasi E-Katalog. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian dan melakukan kajian ilmiah secara mendalam Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa terhadap UMKM di Kota Batu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan teori Grindle Terhadap UMKM di Kota Batu ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis *Content of policy* (isi kebijakan) dalam implementasi e-katalog di Kota Batu, mencakup tujuan kebijakan, manfaat yang diharapkan, serta dampaknya terhadap UMKM.
2. Mengevaluasi *Context of implementation* (konteks implementasi) kebijakan e-katalog di Kota Batu, dengan menyoroti peran lingkungan, aktor-aktor kunci, dan sumber daya yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok masalah, dan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat praktis dan akademis. Manfaat tersebut adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan serta menambah wawasan, khususnya dalam implementasi kebijakan, dan sebagai kontribusi dalam Ilmu Administrasi Publik.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia Pendidikan, beberapa temuan dari penelitian ini memiliki potensi untuk memajukan pemahaman ilmiah tentang bagaimana berbagai kebijakan diterapkan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta saran yang positif bagi pihak terkait atau yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan mengenai implementasi kebijakan publik, terutama dalam pelaksanaan katalog elektronik untuk UMKM di wilayah Kota Batu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan penjabaran di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik melalui penelitian ini, sebagai berikut:

1. Terkait *Content of Policy* (Isi Kebijakan), Implementasi e-katalog di Kota Batu menunjukkan transformasi signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, dengan memberikan manfaat berupa peningkatan transparansi, efisiensi, dan akses pasar bagi UMKM. Kebijakan ini menciptakan perubahan fundamental dalam mekanisme transaksi dan pola kerja, meskipun masih menghadapi tantangan dalam adaptasi teknologi dan pemahaman regulasi oleh UMKM. Dampak utama yang dirasakan meliputi kemudahan akses pasar yang lebih luas, kepastian pembayaran yang lebih terjamin, serta peningkatan transparansi dalam proses pengadaan, walaupun masih diperlukan pendampingan intensif untuk mengoptimalkan manfaat bagi seluruh UMKM.
2. Terkait *Context of Implementation* (Konteks Implementasi), Keberhasilan implementasi e-katalog di Kota Batu sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara berbagai aktor kunci (pemerintah, LKPP, penyedia jasa, dan UMKM) serta karakteristik institusional yang ada. Meskipun terdapat dukungan kuat dari pemerintah dan penyedia layanan, masih ditemui tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kompleksitas administratif. Faktor-faktor yang mendukung implementasi mencakup komitmen pemerintah dalam pengawasan dan regulasi, sedangkan faktor

penghambat meliputi keterbatasan pemahaman digital UMKM, infrastruktur yang belum merata, serta prosedur administratif yang masih kompleks. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam pendampingan dan penyederhanaan prosedur untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk CV Bias Cipta Estetika disarankan untuk mengembangkan program pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi UMKM, tidak hanya pada tahap awal pendaftaran tetapi juga selama proses penggunaan e-katalog. Program ini sebaiknya mencakup pelatihan teknis penggunaan sistem, pemahaman regulasi, dan manajemen administrasi digital. Hal ini akan membantu mengatasi kesenjangan pemahaman digital yang masih menjadi kendala utama bagi banyak UMKM.
2. Untuk pihak UMKM disarankan lebih proaktif dalam meningkatkan kemampuan digital dan pemahaman sistem e-katalog melalui partisipasi aktif dalam pelatihan yang disediakan, serta membangun jejaring dengan sesama pelaku UMKM yang telah berhasil mengimplementasikan e-katalog. Sikap proaktif ini penting untuk mempercepat proses adaptasi terhadap sistem digital dan memaksimalkan manfaat dari platform e-katalog.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif implementasi e-katalog di berbagai daerah dengan karakteristik UMKM yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi e-katalog di tingkat daerah. Hal ini

akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang efektivitas kebijakan e-katalog dalam konteks yang berbeda-beda.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi*, Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Grindle, M. S. (2017). One Policy content and context in implementation. *Polifics and policy implementafion in the Third World*, 3-34.
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, (2014): *Analisis Data Kualitatif*
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudaryono, D. (2015). *Pengantar Bisnis, Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tunggal, A.W. (2004). *Manajemen strategik*, Jakarta: Havarindo.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal atau Skripsi:

- Arifin, Z. (2018). Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 54-63.
- Anderson, E. (2011). Democracy, Public Policy, and Lay Assessments of Scientific Testimony1. *Episteme*, 8(2), 144-164.
- Ati Nurul, U. (2021). *Deliberatif Aktor Dalam Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Dolly di Kota Surabaya*.
- Cahyanti, M. M., & Anjaningrum, W. D. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 73-79.
- Damayanti, A. I. (2013). *Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1970-1981.
- Halawa, S. J., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Dinamika Perubahan Profesionalisme Pegawai sebagai Bentuk Adaptasi Sistem Kerja Baru di Tempat Usaha di Kota Gunungsitoli. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1525-1534.

- Hasibuan, R. P., & Amin, R. M. (2016). *Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Pekanbaru Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77-97.
- Jennings, P., & Beaver, G. (1997). The performance and competitive advantage of small firms: a management perspective. *International small business journal*, 15(2), 63-75.
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81-92.
- Prikustiawan, A. (2023). Analisis Kebijakan Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Lokal Untuk Pengembangan Umkm Di Pemerintah Kota Surabaya. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(2), 177-184.
- RANDI, B. S. (2018). *Perbaikan Proses Layanan Resto Dengan Menggunakan Qfd (Quality Function Deployment) Dan Internal Benchmarking Pada Kober Mie Setan Gresik* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Suryono, A., Rahayu, Y. D., Winasis, M. A., & Murod, M. F. N. (2022). E-katalog dalam pemasaran barang/jasa pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam masa pandemi Covid-19. *Journal of Community Development*, 2(2), 66-69.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Lp3es.

Peraturan atau Perundang Undangan:

- PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2016*. (2016). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96386/perda-kota-batu-no-1-tahun-2016>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Online dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- PERPRES No. 16 Tahun 2018*. (2018). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>
- PERPRES No. 54 Tahun 2010*. (2018). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41063/perpres-no-54-tahun-2010>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Internet:

- <https://tugumalang.id>. (2023, June 28). *Pj Wali Kota Batu Minta OPD Kurangi Belanja Langsung, Lewat E-Katalog Saja*. Tugumalang.id. <https://tugumalang.id/pj-wali-kota-batu-minta-opd-kurangi-belanja-langsung-lewat-e-katalog-saja/>
- Wibowo, A. (2023, February 22). *malang-post.com - Wali Kota Batu: Produk UMKM Kota Batu Sudah Murah, Tak Ada Bentuk, Tak Laku Pula*. Malang-Post.com. <https://malang-post.com/2023/02/22/wali-kota-batu-produk-umkm-kota-batu-sudah-murah-tak-ada-bentuk-tak-laku-pula/>